



TAJUK RENCANA

'Food Bank' Walikota Yogya

WALI Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, membuat gerakan baru dalam program perubahan. Yakni ketahanan pangan versi Kota Yogyakarta sebagai upaya menjamin akses pangan yang mudah dan terjangkau. Khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, warga prasejahtera, panti asuhan, dan warga yang memerlukan. Ia menggagas program tersebut, karena kota ini memiliki keterbatasan lahan pertanian. Program yang digelar bertajuk Quick Wins 100 Hari Kerja 100 Perubahan.

Walikota Hasto mengembangkan konsep Lumbung Mataraman sebuah inisiatif yang berfokus pada food bank, food rescue, dan food charity. Program ini beroperasi dengan mengumpulkan makanan berlebih dari hotel, restoran, katering, dan donasi masyarakat, lalu mendistribusikannya ke mereka yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya mengurangi food waste atau pemborosan makanan, tetapi juga membangun ketahanan pangan berbasis gotong royong dan kolaborasi antarstakeholder.

Data menunjukkan, Indonesia membuang sekitar 23-48 juta ton makanan per tahun. Dengan kerugian ekonomi mencapai ratusan triliun rupiah, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat pemborosan makanan tertinggi di Asia Tenggara.

Menurut Walikota Yogya, ketahanan pangan diukur dari sejauh mana kelompok dhuafa dan prasejahtera dapat mengakses pangan dengan mudah dan terjangkau. Lumbung Mataraman menjadi simbol ketahanan pangan kota yang berdaulat secara sosial, meski tidak berdaulat secara agraris karena keterbatasan lahan.

Gerakan menarik ini, kunci utama adalah kolaborasi. Karena melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan dan distribusi pangan.

Selain itu, berlitar gotong royong. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan swasta untuk berbagi makanan berlebih. Menyelamatkan makanan yang masih layak konsumsi dari limbah makanan.

Maka aksi ini, harus disertai pula dis-

tribusi efektif. Yakni menyalurkan pangan langsung ke sasaran yang membutuhkan, seperti lansia, balita, ibu hamil, pelajar dan mahasiswa terlanjar. Dengan demikian, ketahanan pangan versi Wali Kota Yogyakarta menekankan pada akses, kolaborasi, dan pemanfaatan sumber daya lokal, meski tanpa lahan pertanian yang luas.

Sejumlah negara sebenarnya telah memanfaatkan food waste. Seperti Jepang menggunakan teknologi untuk mengelola food waste. Menggunakan aplikasi yang menghubungkan restoran dan toko dengan konsumen, agar makanan yang hampir kedaluwarsa bisa dijual dengan harga diskon. Kemudian Prancis menerapkan larangan bagi supermarket membuang makanan yang masih layak konsumsi. Makanan tersebut wajib didonasikan kepada bank makanan atau organisasi sosial untuk didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.

Food bank ini, tentu saja perlu dukungan semua pihak yang terlibat. Sebab masih bergantung pada donasi dari hotel, restoran, dan pelaku usaha, sehingga ketersediaan pangan tidak selalu stabil. Jika terjadi penurunan donasi atau bencana, rantai pasok pangan bisa terganggu dan program terganggu.

Meski sudah melibatkan berbagai pihak, partisipasi aktif masyarakat, perusahaan, dan komunitas lokal masih perlu ditingkatkan. Semuanya agar distribusi pangan lebih optimal dan berkelanjutan. Karenanya kolaborasi lintas sektor masih perlu diperkuat untuk memastikan program berjalan efektif dan inklusif.

Karena itulah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program masih selalu ditingkatkan. Semuanya untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi penerima.

Secara keseluruhan, Food Bank Lumbung Mataraman berdampak signifikan dalam meningkatkan akses pangan, mengurangi pemborosan makanan, serta memperkuat ketahanan pangan dan solidaritas sosial di Kota Yogyakarta. (***)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanian dan Pangan			

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005